



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BATU BARA**

# **LAPORAN KINERJA**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

**TAHUN 2025**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Kineja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	Realisasi
						(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Opini BPK	Opini BPK	WTP	n/a	n/a	14.179.205.071	12.090.380.440	85,31
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82,00 (A)	82,00 (A)	100	217.220.212.710	193.168.950.028	88,93
<b>Total Belanja</b>						<b>231.399.417.781</b>	<b>205.259.330.468</b>	<b>88,70</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja diatas, hanya sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah saja yang saat ini realisasi kinerjanya dapat diperoleh yakni dengan nilai 82,00 dengan predikat A dari target 82,00 yang ditetapkan. Sedangkan sasaran tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP belum dapat diperoleh realisasinya dikarenakan sampai dengan saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sedang disusun.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan (BKAD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja yang disusun secara periodik

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja tahun berikutnya. Harapannya, Laporan ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Air Putih, Januari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**DR. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19870526 200602 2 002**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Struktur Organisasi .....	2
1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	3
1.5. Isu Strategis .....	4
1.6. Keadaan Pegawai .....	5
1.7. Sarana Dan Prasarana .....	6
1.8. Keuangan.....	9
1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Perencanaan Strategis.....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	13
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
3.1. Perkembangan Capaian Kinerja Hingga Tahun 2025 .....	19
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis .....	21
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	23
3.4. Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
4.1. Kesimpulan .....	38
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	38

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja .....	6
Tabel 2.1	Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025..	15
Tabel 2.2	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis.....	15
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	15
Tabel 3.1	Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025.....	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra).....	22
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Anggaran.....	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025....	31
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025...	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Kinerja.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 – 2029.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1) Peningkatan akuntabilitas BKAD Kabupaten Batu Bara;
- 2) Umpan balik bagi peningkatan kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara;
- 3) Meningkatkan Kredibilitas BKAD Kabupaten Batu Bara terhadap pemberi amanah/ delegasi wewenang;
- 4) Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

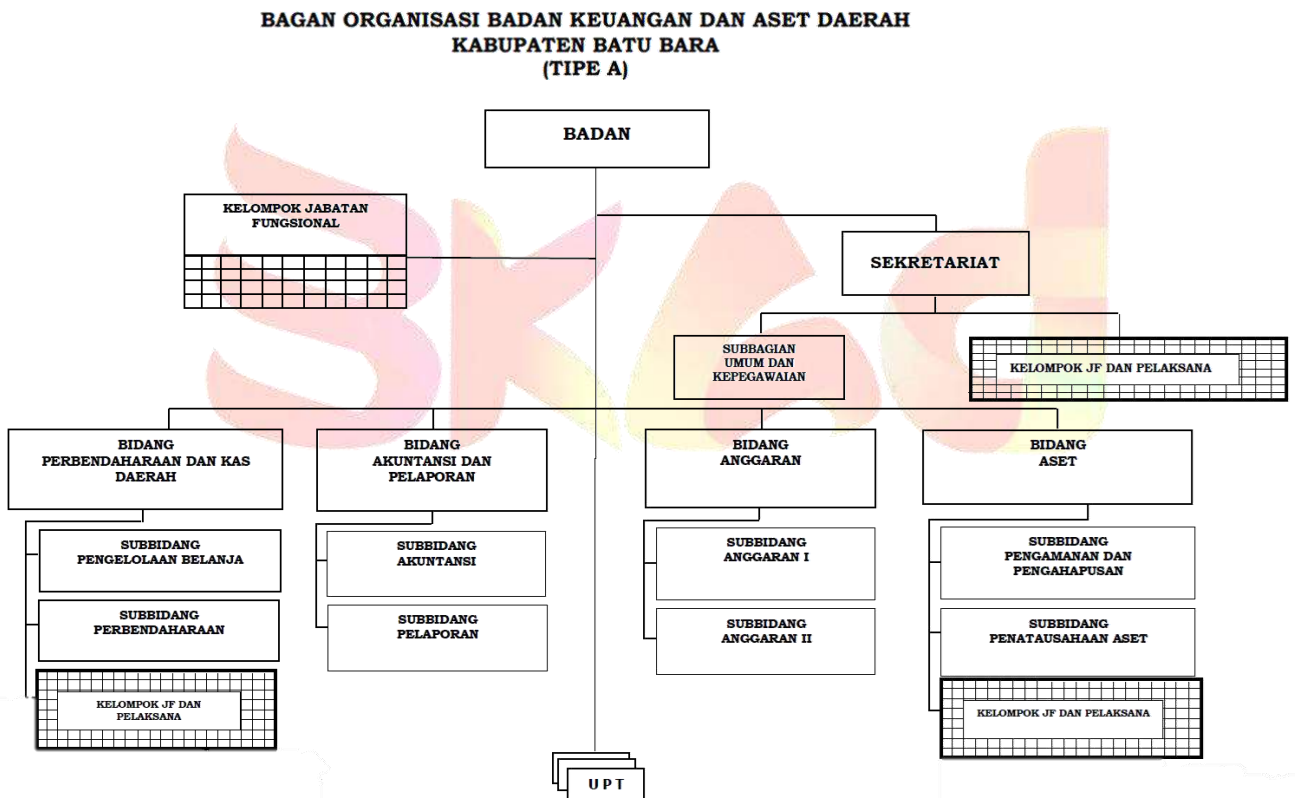
### **1.3. Struktur Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menjabarkan melalui peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan keuangan dan Aset daerah secara umum maka BKAD Kabupaten Batu Bara perlu di tunjang dengan jabatan struktural dan fungsional yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga beban kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh Pejabat Struktural dan fungsional yang mengembannya. BKAD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala Sub Bidang serta 4 (empat) Ketua Tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Ketua Tim Substansi Keuangan, dan
  - c. Ketua Tim Substansi Program
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Anggaran I, dan
  - b. Sub Bidang Anggaran II
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja
  - b. Sub Bidang Perbendaharaan, dan

- c. Ketua Tim Substansi Pengelolaan Kas
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi, dan
  - b. Sub Bidang Pelaporan
- 6. Bidang Aset, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan
  - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset, dan
  - c. Ketua Tim Substansi Pemanfaatan Potensi Aset Daerah

Adapun Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



#### 1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, serta Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah sela kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.

### **1.5. Isu Strategis**

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai *Good* dan *Clean Governance*. Adapun

beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Mempertahankan Opini atas Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
4. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
5. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang

#### 1.6. Keadaan Pegawai

Aparatur Sumber Daya Manusia BKAD Kabupaten Batu Bara sampai dengan Bulan Desember 2025 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.1. dan berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.3. berikut ini :

Tabel 1.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	0	1	1
2	Eselon III A	1	0	1
3	Eselon III B	4	0	4
4	Eselon IV A	3	4	7
5	Pelaksana	9	14	23
6	Subkoordinator / Ketua Tim	3	1	4
7	Fungsional	0	0	0
8	PPPK	1	1	2
9	PPPK Paruh waktu	6	10	16
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>31</b>	<b>58</b>

Tabel 1.2.  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	16	14	30
3	Golongan II	3	5	8
4	Golongan IX	1	1	2
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>

Tabel 1.3.  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Doktor (S3)	0	1	1
2	Magister (S2)	3	4	7
3	Sarjana (S1)	17	18	35
4	Diploma III	4	4	8
5	SLTA	3	4	7
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>30</b>	<b>58</b>

### 1.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Batu Bara yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	A.C. Split	8
2	A.C. Window	22
3	Acces Point	18
4	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Lain-lain	1
5	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	4
6	Alat Pemadam/Portable	2
7	Alat Penghancur Kertas	1
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
9	Alat Tenis Meja	1
10	Alat Ukur Lainnya Lain-Lain	1
11	Alat Ukur Universal Lain-lain	1
12	Bracket Standing Peralatan	1
13	Braket	1
14	Brandkas	4
15	Camera Digital	2
16	cctv	10
17	CCTV - Camera Control Television System	8
18	Dinonaktifkan	25
19	Dispenser	8
20	Dongkrak Mekanik	1
21	Exhause Fan	6
22	External	8
23	External/ Portable Hardisk	3
24	Filing Cabinet Besi	7
25	Gordyin/Kray	10
26	Handy Talky (HT)	2
27	Kipas Angin	2
28	Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain	3
29	Kontainer	75
30	Kursi Besi/Metal	87
31	Kursi Biasa	2
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	11
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9
35	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	11
36	Kursi Putar	35
37	Kursi Rapat	80
38	Kursi Tamu	3
39	Lap Top	40
40	Layar Film/Projector	3
41	LCD Projector/Infocus	2
42	Lemari	4
43	Lemari Besi/Metal	8
44	Lemari Es	2
45	Lemari Kayu	6
46	Loudspeaker	1
47	Meja 1/2 Biro	31
48	Meja Bundar	1
49	Meja Kerja Kayu	3
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
54	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
55	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	18
56	Meja Resepsionis	2
57	Mesin Absen (Time Recorder)	1
58	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	1
59	Mesin Bor Tangan	1
60	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1
61	Microphone	1
62	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1
63	Monitor	6
64	Netware Interface External	15
65	P.C Unit	70
66	Papan Nama Instansi	1
67	Papan Pengumuman	125
68	Papan Visual/Papan Nama	1
69	Partisi	22
70	Penangkal Petir	2
71	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
72	Peralatan Studio Video Dan Film Lain- Lain	1
73	Perkakas Bengkel Services Lain-Lain	3
74	Pick Up	1
75	Pompa Air	2
76	Portable Generating Set	1
77	Portable Reporter Link	1
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	59
79	Rak Besi	3
80	Rak Kayu	1
81	Rak Server	1
82	Rak-Rak Penyimpan	1
83	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8
85	Self Supporting Tower	1
86	Server	3
87	Sofa	3
88	Sound System	2
89	Stabilisator	4
90	Telephone Mobile	8
91	Televisi	4
92	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5
93	Unit Power Supply	1
94	Video Conference	1
95	Web Cam	4
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>1005</b>

## 1.8. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKAD pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Alokasi anggaran murni BKAD untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp.233.787.965.489,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.231.489.417.781,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## 1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab V – Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2025 - 2029 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, BKAD menyusun perencanaan kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis daerah. Visi dan Misi Bupati Batu Bara menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana kinerja ini. Adapun visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**Visi :**

Mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang BAHAGIA : Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil untuk BATU BARA YANG BAHAGIA.

**Misi :**

1. Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang **BERORIENTASI PELAYANAN** dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat;

2. Menjaga **AMANAH** dan kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegritas dan pembangunan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang **HARMONIS**;
4. Mewujudkan tata pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang **AKUNTABEL** dan transparan;
5. Mewujudkan Masyarakat yang **GIAT** berbasis religious, berbudaya dan berkarakter kuat sebagai pondasi Pembangunan daerah;
6. Mendorong **INOVASI** kreatifitas di segala bidang Pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah;
7. Mewujudkan Pembangunan yang **ADIL** dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara tanpa diskriminatif untuk kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam rencana kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang terkolerasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
- b. Konsisten dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- d. Pemetaan secara cermat potensi risiko yang akan terjadi Ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Berdasarkan Renstra BKAD 2025-2029, Tujuan BKAD adalah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BKAD menetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas opini BPK;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Perencanaan kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala BKAD Kab. Batu Bara dengan Bupati Batu Bara. Ringkasan perjanjian

kinerja mencakup target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran strategis,

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara merupakan dokumen formal yang memuat komitmen dan kesepakatan antara Kepala BKAD dengan Bupati Batu Bara mengenai target dan capaian kinerja yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2025. Perjanjian ini menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja BKAD dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Perjanjian Kinerja ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Sasaran Strategis: Fokus utama perjanjian kinerja adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Sasaran ini selaras dengan tujuan BKAD dalam Renstra 2025-2029.
- b. Indikator Kinerja Utama: BKAD menetapkan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian.
- c. Target Kinerja: Target yang disepakati dalam perjanjian kinerja meliputi:  
Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini, BKAD berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan terukur, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara secara berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. BKAD Kabupaten Batu Bara telah Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta diperbaharui pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

menyesuaikan dengan adanya Perubahan APBD Tahun 2025 BKAD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 yaitu : **“Mewujudkan tata pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang AKUNTABEL dan transparan”** sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Batu Bara melaksanakan tugas sesuai rencanan yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun Target belanja BKAD Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.1  
Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	17.056.570.864	7,37 %
Belanja Modal	434.630.000	0,19 %
Belanja Tidak Terduga	2.193.392.527	0,95 %
Belanja Transfer	211.804.824.390	91,49 %
<b>Jumlah</b>	<b>231.489.417.781</b>	<b>100 %</b>

Sedangkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Presentase
1	Meningkatnya Kualitas Opini BPK	217.310.212.710	93,87 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	141.79.205.071	6,13 %
<b>JUMLAH</b>		<b>231.489.417.781</b>	<b>100 %</b>

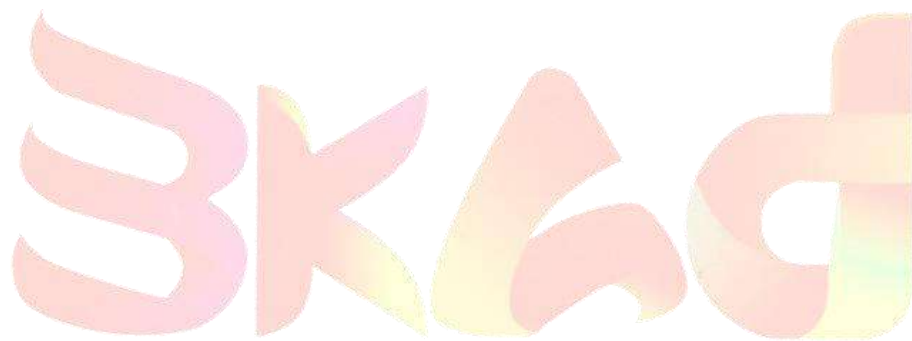
Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara beberapa program dan kegiatan, program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3  
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel di atas, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada Tahun Anggaran 2025 menampung dan melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2025.
2. Penurunan kinerja serta alternatif analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target serta realisasi pada indikator sasaran dengan rincian sebanyak 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Opini BPK	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	N/A

Dari tabel diatas, Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas opini BPK, indikator kinerja utama yang digunakan adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Target yang ditetapkan adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, data

mengenai realisasi dan capaian dalam bentuk persentase belum tersedia (N/A), karena proses audit oleh BPK masih berlangsung.

Opini WTP adalah standar tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh standar nasional. Sebagai perbandingan, standar nasional menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, capaian opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi standar nasional tersebut.

Keberhasilan capaian atas sasaran dan indikator kinerja diatas ditunjang oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta bidang Akuntansi dan Pelaporan. Selain itu ditunjang pula oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di laksanakan oleh bidang Aset BKAD Kabupaten Batu Bara.

- **Sasaran 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	82,00 (A)	82,00 (A)	100%

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Target yang ditetapkan adalah nilai A dengan skor 82,00. Hasil realisasi menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah A dengan skor 82,00, yang berarti mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja diatas didukung oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat yang mampu memotivasi dan mengarahkan tim untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Staf yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan kinerja,

mampu mengelola tugas dengan baik dan tepat waktu. Koordinasi yang baik antara berbagai perangkat daerah dan instansi terkait juga menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian atas sasaran dan indikator kinerja diatas ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh bidang Sekretariat BKAD Kabupaten Batu Bara.

### **3.1. Perkembangan Capaian Kinerja Hingga Tahun 2025**

Dalam beberapa tahun terakhir, BKAD Kabupaten Batu Bara telah berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Dengan tujuan utama meningkatnya kualitas opini BPK dan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Perkembangan capaian kinerja ini menggambarkan komitmen dan dedikasi BKAD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hingga tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan kerja keras dan koordinasi yang efektif antara berbagai perangkat daerah.

Perkembangan capaian kinerja BKAD Tahun 2025 dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021			2022			2023			2024			2025		
				TARGET	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Opini BPK	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WDP	66,67	WTP	WDP	66,67	WTP	N/A	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	B	B	100	B	B	100	70,05 BB	70,14 BB	100,13	72,00 (BB)	72,81 (BB)	101,13	82,00 (A)	82,00 (A)	100

Dari tabel diatas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indikator dengan uraian sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Opini BPK

Pada tahun 2021 hingga 2022, pemerintah daerah berhasil mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian 100%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menunjukkan penurunan capaian menjadi 66,67%. Pada Tahun 2025, opini BPK belum dapat disajikan dikarenakan sampai dengan saat ini, Tim auditor BPK belum turun untuk melakukan pemeriksaan di Kabupaten Batu Bara, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dapat diperoleh.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Dari tahun 2020 hingga 2022, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100% setiap tahunnya pada level B. Pada tahun 2023, target nilai AKIP meningkat ke level BB dengan skor 70,14, dan hasil realisasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 100,13%.

Pada tahun 2024, target nilai AKIP tetap pada level BB dengan skor 72,00. Realisasi menunjukkan peningkatan capaian menjadi 101,13% dengan skor 72,81. Hal ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis**

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun capaian kinerja berdasarkan target rencana strategis (renstra) dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
				TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Opini BPK	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73,50 (BB)	82,00 (A)	111,56

Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah telah menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan melalui indikator utama yang tercantum dalam Tabel 3.2, dengan hasil sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Opini BPK**

Target Renstra tahun 2025 adalah memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian, hingga periode pelaporan ini, data realisasi opini BPK belum tersedia sehingga capaian persentase tidak dapat dihitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan masih menunggu proses audit resmi dari BPK.

2. **Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator yang digunakan adalah **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**. Target Renstra tahun 2025 ditetapkan sebesar **73,50** dengan kategori **BB (Baik)**. Realisasi capaian menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai **82,00** dan kategori **A (Memuaskan)**. Persentase capaian mencapai **111,56%**, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

BKAD melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja rutin dilakukan setiap triwulan.

### **3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya**

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama OPD.

Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Sementara pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah.

Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara mempertimbangan objektifitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam mengukur capaian indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2025 didasarkan pada:

1. Angka maksimum capaian indikator sasaran ditetapkan 100% penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator sasaran adalah:

- *Opini BPK = Nilai Opini BPK*
- *Nilai AKIP = Nilai Evaluasi AKIP OPD dari Inspektorat*

### 3.4. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja BKAD Kab Batu Bara dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut diatas, maka untuk target dan realisasi anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Anggaran

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target		Realisasi				%	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	K	Rp.		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>A (82,00)</b>	<b>Nilai</b>	<b>14.179.205.071</b>	<b>A (82,00)</b>	<b>Nilai</b>	<b>12.096.380.440</b>	<b>100</b>	<b>85,31</b>
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	94.696.420	100	%	83.718.650	100	88,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	30.742.940	3	dok	30.123.150	100	97,98
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	3	dok	18.105.480	2	dok	10.203.500	67	56,36
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3	dok	22.950.480	3	dok	22.494.100	100	98,01

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target		Realisasi		%			
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	K	Rp.		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	22.897.520	3	Laporan	20.897.900	100	91,27
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9.379.819.364</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>7.860.063.675</b>	<b>96</b>	<b>83,80</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang/bln	9.315.315.724	42	orang/bln	7.802.143.425	100	83,76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	22.095.000	1	Laporan	21.591.750	100	97,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	29.710.000	14	Laporan	25.296.000	88	85,14
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	dok	12.698.640	12	dok	11.032.500	100	86,88
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>222.492.000</b>	<b>%</b>	<b>203.292.000</b>	<b>-</b>	<b>91,37</b>	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71	org	222.492.000	68	org	203.292.000	96	91,37
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>871.676.679</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>788.551.355</b>	<b>100</b>	<b>90,46</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.706.839	12	Paket	17.604.880	100	99,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	282.195.909	12	Paket	274.351.742	100	97,22
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	59.063.011	12	Paket	48.851.004	100	82,71

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%	
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	K	Rp.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	113.089.180	12	Paket	51.664.500	100	45,68
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	31.661.740	12	Paket	31.224.300	100	98,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undanganyang Disediakan	12	dok	39.900.000	12	dok	37.650.000	100	94,36
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	328.060.000	12	Laporan	327.204.929	100	99,74
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.526.100.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.421.325.000</b>	<b>100</b>	<b>93,13</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18	unit	1.191.600.000	18	unit	1.124.400.000	100	94,36
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	Paket	79.500.000	36	Paket	71.595.000	97	90,06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	Paket	255.000.000	25	Paket	225.330.000	89	88,36
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.775.318.608</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.608.676.853</b>	<b>100</b>	<b>90,61</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.500.000	12	Laporan	5.450.000	100	72,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	774.908.608	12	Laporan	633.294.509	100	81,73
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	992.910.000	12	Laporan	969.932.344	100	97,69
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>309.102.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>130.752.907</b>	<b>100</b>	<b>42,30</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	49.320.000	2	Unit	43.665.375	100	88,53

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%	
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	K	Rp.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	95.370.000	2	unit	34.647.532	100	36,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73	Unit	64.412.000	73	Unit	52.440.000	100	81,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	100.000.000	1	unit	-	100	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>Opini</b>	<b>216.058.640.598</b>	<b>n/a</b>	<b>Opini</b>	<b>192.128.433.204</b>	<b>n/a</b>	<b>88,92</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>843.974.120</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>766.382.500</b>	<b>100</b>	<b>90,81</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	dok	30.834.560	2	dok	29.890.000	100	96,94
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	dok	55.054.560	2	dok	50.236.000	100	91,25
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39	dok	46.850.000	39	dok	13.278.500	100	28,34
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39	dok	43.750.000	39	dok	43.336.145	100	99,05
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39	dok	63.245.000	39	dok	53.387.000	100	84,41
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39	dok	76.260.000	39	dok	72.010.500	100	94,43
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dok	284.545.000	2	dok	270.744.167	100	95,15
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	dok	207.085.000	5	dok	197.723.188	100	95,48
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	dok	20.350.000	1	dok	19.977.000	100	98,17
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85	orang	16.000.000	85	orang	15.800.000	100	98,75
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan realisasi belanja daerah</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>579.901.750</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>558.701.204</b>	<b>105</b>	<b>96,34</b>

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%	
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	K	Rp.
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20	dok	52.960.000	20	dok	52.064.867	100	98,31
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	150	dok	28.750.000	150	dok	25.989.820	100	90,40
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	65	dok	72.845.000	65	dok	68.999.400	100	94,72
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6000	dok	193.647.000	6000	dok	189.546.375	100	97,88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100	Laporan	32.400.000	100	Laporan	30.191.820	100	93,18
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	40	dok	14.140.000	40	dok	13.689.774	100	96,82

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%	
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	K	Rp.
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21	Dok	38.810.000	21	Dok	34.938.000	100	90,02
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24	dok	58.188.750	24	dok	56.809.346	100	97,63
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	456	Orang	88.161.000	456	Orang	86.471.802	100	98,08
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>652.894.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>537.854.310</b>	<b>100</b>	<b>82,38</b>
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	Laporan	77.495.000	2	Laporan	62.723.800	100	80,94
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	dok	31.349.000	2	dok	30.500.000	100	97,29
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	Laporan	40.920.000	18	Laporan	37.519.160	100	91,69
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42	Laporan	79.280.000	42	Laporan	78.656.000	100	99,21
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dok	130.845.000	2	Dok	130.041.850	100	99,39

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target		Realisasi		%			
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	K	Rp.		
	APBD Kabupaten/Kota								
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	3	dok	138.480.000	3	dok	108.256.200	100	78,17
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	116	orang	133.560.000	116	orang	73.347.300	100	54,92
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Laporan	20.965.000	1	Laporan	16.810.000	100	80,18
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>213.981.870.728</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>190.265.495.190</b>	<b>100</b>	<b>88,92</b>
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12	Laporan	73.653.811	12	Laporan	73.653.811	100	100,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	197.913.023.700	12	Laporan	175.589.876.498	100	88,72
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	2.103.392.527	12	Laporan	710.164.191	100	33,76
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	13.891.800.690	12	Laporan	13.891.800.690	100	100,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Aset Dalam Kondisi Baik</b>	<b>92</b>	<b>%</b>	<b>1.161.572.112</b>	<b>89,49</b>	<b>%</b>	<b>1.040.516.824</b>	<b>97</b>	<b>89,58</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Inventarisasi Asset Perangkat Daerah yang disusun tepat</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.161.572.112</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.040.516.824</b>	<b>100</b>	<b>89,58</b>
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Laporan	122.630.112	1	Laporan	117.803.220	100	96,06
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	150.450.000	2	Laporan	101.316.301	100	67,34
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	280.655.000	1	Laporan	223.428.887	100	79,61

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target		Realisasi		%			
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	K	Rp.		
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	19.500.000	1	Laporan	16.179.500	100	82,97
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	dok	335.380.000	2	dok	331.376.566	100	98,81
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan	6.300.000	1	Laporan	5.930.000	100	94,13
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	138.829.000	1	Laporan	136.654.350	100	98,43
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	39	orang	107.828.000	39	orang	107.828.000	100	100,00

Selanjutnya, perbandingan dengan realisasi tahun lalu ditampilkan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Tahun Anggaran	
	2024	2025
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.810.886.960</b>	<b>14.179.205.071</b>
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>137.083.470</b>	<b>94.696.420</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.435.000	30.742.940
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.182.000	18.105.480
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.590.000	22.950.480
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.876.470	22.897.520
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.088.356.107</b>	<b>9.379.819.364</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.946.511.357	9.315.315.724
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.981.000	22.095.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.888.750	29.710.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.975.000	12.698.640
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>709.900.000</b>	<b>222.492.000</b>

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Tahun Anggaran	
	2024	2025
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	177.000.000	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	532.900.000	222.492.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.446.930.447</b>	<b>871.676.679</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.394.000	17.706.839
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.479.000	282.195.909
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.287.000	59.063.011
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.746.500	113.089.180
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.775.000	31.661.740
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.200.000	39.900.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	809.048.947	328.060.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.631.378.000</b>	<b>1.526.100.000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.136.950.000	1.191.600.000
Pengadaan Mebel	241.470.000	79.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.958.000	255.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.531.647.586</b>	<b>1.775.318.608</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	7.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	327.995.242	774.908.608
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.199.652.344	992.910.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>265.591.350</b>	<b>309.102.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.894.000	49.320.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.387.350	95.370.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.455.000	64.412.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.855.000	100.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>213.506.398.626</b>	<b>216.058.640.598</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.263.602.420</b>	<b>843.974.120</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	61.356.000	30.834.560
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	70.770.120	55.054.560
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.271.789	46.850.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	91.407.373	43.750.000
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	123.171.000	63.245.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	133.611.181	76.260.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	259.099.000	284.545.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	272.463.209	207.085.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	52.148.000	-
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	102.792.748	-

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Tahun Anggaran	
	2024	2025
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	24.512.000	20.350.000
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	16.000.000
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.225.150.560</b>	<b>579.901.750</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	78.790.954	52.960.000
Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	117.978.071	28.750.000
Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	156.748.996	72.845.000
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	239.186.000	193.647.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	74.197.730	32.400.000
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	49.780.705	14.140.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	66.965.550	38.810.000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	270.863.454	58.188.750
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170.639.100	88.161.000
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.027.999.694</b>	<b>652.894.000</b>
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	120.048.000	77.495.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	123.173.116	31.349.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	255.443.808	40.920.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	118.367.000	79.280.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	164.107.547	130.845.000
Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	145.738.333	138.480.000
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46.266.900	133.560.000
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	54.854.990	20.965.000
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>209.989.645.952</b>	<b>213.981.870.728</b>
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	97.541.537	73.653.811
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	201.444.446.800	197.913.023.700

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Tahun Anggaran	
	2024	2025
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	2.103.392.527
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.447.657.615	13.891.800.690
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.508.891.833</b>	<b>1.161.572.112</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.508.891.833</b>	<b>1.161.572.112</b>
Penyusunan Standar Harga	40.000.706	122.630.112
Penatausahaan Barang Milik Daerah	529.086.533	150.450.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah	441.622.540	280.655.000
Penilaian Barang Milik Daerah	-	19.500.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	272.949.563	335.380.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	600.000	6.300.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	224.632.491	138.829.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	107.828.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>226.826.177.419</b>	<b>231.399.417.781</b>

Adapun realisasi beberapa subkegiatan tidak terserap maksimal antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Realisasi anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya kelalaian dalam proses pelaksanaan, dimana anggaran yang telah dialokasikan tidak segera direalisasikan sesuai jadwal. Fokus pelaksanaan lebih tertuju pada penyusunan dokumen perencanaan, sementara tindak lanjut terhadap realisasi anggaran terlewatkan. Akibatnya, sebagian anggaran tidak digunakan hingga akhir tahun anggaran.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyerapan anggaran rendah karena kegiatan rapat yang semula direncanakan secara tatap muka lebih banyak dilaksanakan secara daring. Hal ini mengurangi kebutuhan logistik kantor, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terserap secara maksimal.

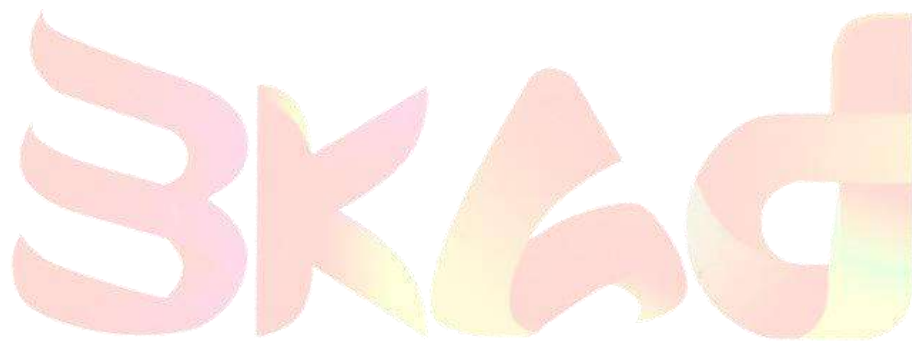
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi anggaran tidak maksimal karena terdapat biaya bahan bakar yang tidak dapat dibayarkan. Hal ini terjadi karena status kendaraan dinas yang digunakan adalah kendaraan sewa, sehingga pengeluaran

bahan bakar tidak dapat dibebankan pada anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Anggaran tidak terserap sepenuhnya karena terjadi kesalahan rekening belanja. Dana yang semula direncanakan untuk pembangunan fasilitas parkir tercatat pada rekening pemeliharaan/rehabilitasi gedung, sehingga tidak dapat direalisasikan sesuai peruntukan.
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  
Realisasi anggaran rendah karena waktu pencairan anggaran sangat dekat dengan berakhirnya tahun anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga sebagian anggaran tidak dapat digunakan.

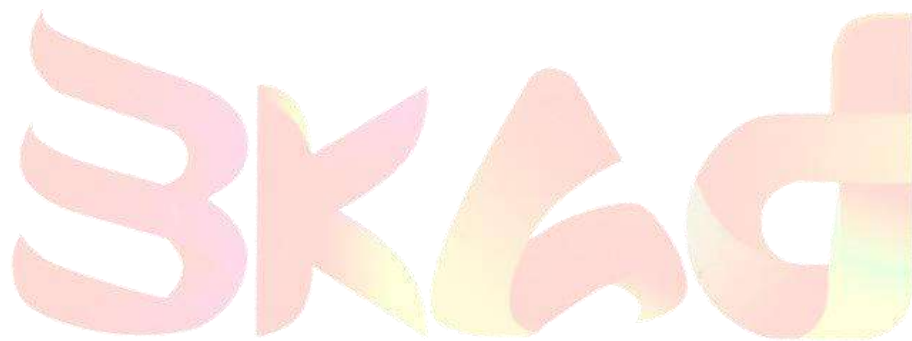
Adapun anggaran dan realisasi belanja per sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 3.5  
 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
						(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Kualitas Opini BPK	Opini BPK	WTP	WDP	66,67	14.179.205.071	12.090.380.440	85,31	N/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82,00 (A)	82,00 (A)	100	217.220.212.710	193.168.950.028	88,93	1,00
<b>Total Belanja</b>						<b>231.399.417.781</b>	<b>205.259.330.468</b>	<b>88,70</b>	

Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan Tabel 3.5, total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp231.399.417.781**, dengan realisasi mencapai **Rp205.259.330.468** atau **88,70%** dari pagu anggaran. Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dengan capaian rata-rata di atas 85%. Namun, masih terdapat tantangan dalam pencapaian opini BPK yang belum sesuai target. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, serta memperkuat kapasitas perangkat daerah agar opini WTP dapat diraih secara konsisten.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah Kabupaten agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

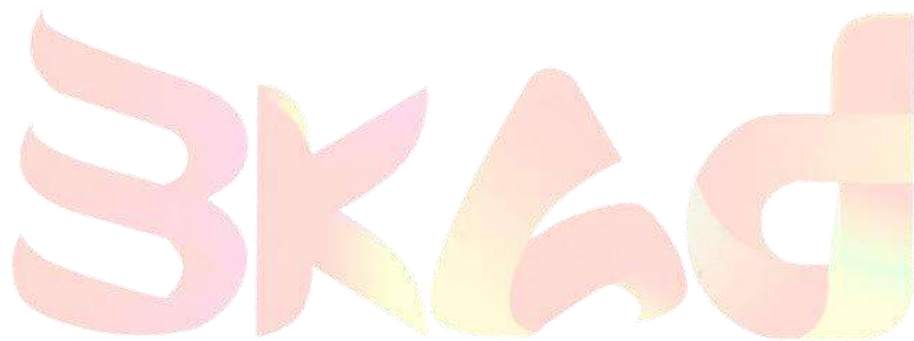
Berdasarkan RENSTRA BKAD Kabupaten Batu Bara tahun 2025 – 2029, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga disadari pembuatan Laporan Tahunan ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Dari sebanyak 2 (dua) sasaran kinerja BKAD Kab. Batu Bara, hanya 1 (satu) sasaran kinerja yang tercapai 100% yaitu sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 88,93%. Sedangkan 1 (satu) sasaran lagi yakni sasaran meningkatnya kualitas opini BPK hanya belum dapat diukur, karena menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/ kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan

pertimbangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.





**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Jabatan : **Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.**  
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**BUPATI BATU BARA**



**H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.**

Pihak Pertama,  
**Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751010 199603 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Opini BPK	Opini BPK	Nilai Opini	WTP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	A (82,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.179.205.071	PAPBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	216.148.640.598	PAPBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.161.572.112	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>231.489.417.781</b>	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**BUPATI BATU BARA**



**H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.**

Pihak Pertama,  
**Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751010 199603 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Jabatan : **SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RENOLD ASMARA, AP, S.H., M.Si.**  
Jabatan : **Pit. KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Pit. KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, AP, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama,  
**SEKRETARIS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
SEKRETARIS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Huruf	A (82,00)
2	Tercapainya cakupan program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.179.205.071	PAPBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	216.148.640.598	PAPBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>230.327.845.669</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
Pit. **KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, AP, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama,  
**SEKRETARIS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BINTI CHOIRUL MUAMANAH, S.E., M.Si.**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama  
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**BINTI CHOIRUL MUAMANAH, SE., M.Si.**  
Penata  
NIP. 19790710 201001 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Tercapainya penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0
	Tercapainya penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	71
<b>2</b>	<b>Tercapainya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
<b>3</b>	<b>Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersedianya unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	18
	Tersedianya Mebel yang dibutuhkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	37
	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28
<b>4</b>	<b>Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
<b>5</b>	<b>Tercapainya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>

<b>NO</b>	<b>SASARAN / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1
	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1
	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	73
	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>222.492.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	PAPBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	222.492.000	PAPBD
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>871.676.679</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.706.839	PAPBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.195.909	PAPBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.063.011	PAPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.089.180	PAPBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.661.740	PAPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	PAPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.060.000	PAPBD
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.526.100.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.191.600.000	PAPBD
	Pengadaan Mebel	79.500.000	PAPBD
	Pengadaan Peralatan atau Mesin Lainnya	255.000.000	PAPBD
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.775.318.608</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774.908.608	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	992.910.000	PAPBD
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>309.102.000</b>	<b>PAPBD</b>

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.320.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.370.000	PAPBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.412.000	PAPBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>4.704.689.287</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama  
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**BINTI CHOIRUL MUAMANAH, S.E., M.Si.**  
Penata  
NIP 19790107 201001 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MISPRANOTO, S.M.**  
Jabatan : **ANALIS PENDAPATAN DAERAH / KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Jabatan : **SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama  
**KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**MISPRANOTO, S.M.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP 19880121 201001 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Tercapainya penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersedianya dana gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	42
	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	16
	Tersusunnya dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12
<b>2</b>	<b>Tercapainya penyelenggaraan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu</b>	<b>Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	12
	Tersedianya dana dalam penyaluran bantuan keuangan ke desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12
	Terselenggaranya pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12
	Tersedianya dana bagi hasil yang akan diberikan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.379.819.364</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.315.315.724	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.095.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	29.710.000	PAPBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.698.640	PAPBD
2	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>214.071.870.728</b>	<b>PAPBD</b>
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	73.653.811	PAPBD
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	197.913.023.700	PAPBD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.193.392.527	PAPBD
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.891.800.690	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>223.451.690.092</b>	<b>PAPBD</b>

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS BKAD**  
**KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama  
**KETUA TIM KEUANGAN**  
**BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**MISPRANOTO, S.M.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP 19880121 201001 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR. S, S.Pi.**  
Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN /  
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Jabatan : **SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAIPUDIN SEFA, S.EI., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama  
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR. S, S.Pi.**  
Penata Muda Tk.I  
NIP 19911221 201403 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BKAD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3
	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3
	Tersusunnya laporan terkait capaian dan realisasi kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>94.696.420</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	30.742.940	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.105.480	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.950.480	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	22.897.520	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>94.696.420</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS BKAD**  
**KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**  
Pembina  
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama  
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM**  
**BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR.S, S.Pi.**  
Penata Muda Tk.I  
NIP 19911221 201403 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Jabatan : **Plt. KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Jabatan : **Plt. KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**Plt. KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, AP, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**Plt. KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
Pit. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Persen	92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	579.901.750	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>579.901.750</b>	


Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**Pit. KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, AP, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**Pit. KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



**SONGGY WEINER SIAHAAN, S.T**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NURYANTI, S.E., M.M.**  
Jabatan : **KASUBBID PENGELOLAAN BELANJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Jabatan : **Plt. KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
Plt. **KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

Pihak Pertama,  
**KASUBBID PENGELOLAAN  
BELANJA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**NURYANTI, S.E., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19820227 201101 2 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN BELANJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan realisasi belanja daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>92</b>
	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	24
	Terselenggaranya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	456

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>146.349.750</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	58.188.750	PAPBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	88.161.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>146.349.750</b>	<b>PAPBD</b>

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
Pit. **KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

Pihak Pertama,  
**KASUBBID PENGELOLAAN  
BELANJA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**NURYANTI, S.E., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19820227 201101 2 008



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEDI AHMAD FAUJI, S.E.**  
Jabatan : **KASUBBID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Jabatan : **Plt. KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

Pihak Pertama,  
**KASUBBID PERBENDAHARAAN  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**DEDI AHMAD FAUJI, S.E.**  
Penata  
NIP 19841110 201001 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan realisasi belanja daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>
	Tersusunnya dokumen koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	6000
	Tersusunnya dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Laporan	100
	Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	21

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>264.857.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	193.647.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	32.400.000	PAPBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	38.810.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>264.857.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
Pit. **KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

Pihak Pertama,  
**KASUBBID PERBENDAHARAAN  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**DEDI AHMAD FAUJI, S.E.**  
Penata  
NIP 19841110 201001 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EVI RAFDA ARYANI, S.E., M.M.**  
Jabatan : **ANALIS PENDAPATAN DAERAH /  
KETUA TIM SUBSTANSI PENGELOLAAN KAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Jabatan : **Plt. KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PENGELOLAAN KAS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**EVI RAFDA ARYANI, S.E, M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19770929 201001 2 014

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KETUA TIM SUBSTANSI PENGELOLAAN KAS  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan realisasi belanja daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>
	Tersusunnya dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Dokumen	20
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Dokumen	150
	Tersusunnya dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	65
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempata utang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempata utang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	40

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>168.695.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	52.960.000	PAPBD
	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28.750.000	PAPBD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.845.000	PAPBD
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14.140.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>168.695.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Pt. KABID PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PENGELOLAAN KAS BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**EVI RAFDA ARYANI, S.E, M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19770929 201001 2 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Jabatan : **Plt. KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Jabatan : **Plt. KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**Plt. KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, AP, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**Plt. KABID AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860424 201101 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI**  
**Plt. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	652.894.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>652.894.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**Plt. KEPALA BKAD**  
**KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, AP, S.H, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**Plt. KABID AKUNTANSI DAN**  
**PELAPORAN BKAD**  
**KABUPATEN BATU BARA**

**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
 Penata Tk. I  
 NIP 19860424 201101 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WILLY GITA ARJUNA, S.M.**

Jabatan : **KASUBBID AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DHARMAWAN PUTRA, S.E.**

Jabatan : **Plt. KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. KABID AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860424 201101 1 022

Pihak Pertama,  
**KASUBBID AKUNTANSI  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**WILLY GITA ARJUNA, S.M.**  
Penata  
NIP 19870620 201001 1 014

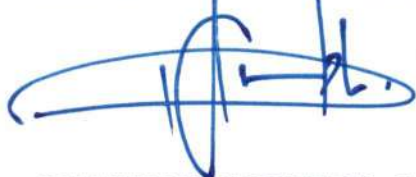
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Meningkatnya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	2
	Tersusunnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18
	Tersusunnya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>170.729.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	77.495.000	PAPBD
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	31.349.000	PAPBD
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	40.920.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	20.965.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>170.729.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Pit. KABID AKUNTANSI DAN  
 PELAPORAN BKAD  
 KABUPATEN BATU BARA**



**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
 Penata Tk. I  
 NIP 19860424 201101 1 022

Pihak Pertama,  
**KASUBBID AKUNTANSI  
 BKAD KABUPATEN BATU BARA**



**WILLY GITA ARJUNA, S.M.**  
 Penata  
 NIP 19870620 201001 1 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Jabatan : **KASUBBID PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Jabatan : **Plt. KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. KABID AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860424 201101 1 022

Pihak Pertama,  
**KASUBBID PELAPORAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860424 201101 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Meningkatnya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	42
	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2
	Tersusunnya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	3
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	116

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>482.165.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	79.280.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	130.845.000	PAPBD
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	138.480.000	PAPBD
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	133.560.000	PAPBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>482.165.000</b>	<b>PAPBD</b>

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**Pit. KABID AKUNTANSI DAN  
 PELAPORAN BKAD  
 KABUPATEN BATU BARA**



**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
 Penata Tk. I  
 NIP 19860424 201101 1 022

Pihak Pertama,  
**KASUBBID PELAPORAN BKAD  
 KABUPATEN BATU BARA**



**DHARMAWAN PUTRA, S.E.**  
 Penata Tk. I  
 NIP 19860424 201101 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.S.T.Pi., M.M.**  
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Jabatan : **Plt. KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**Plt. KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda.  
NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**KABID ANGGARAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ERWINSYAH P. DAULAY, S.S.T.Pi., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19880704 201403 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	843.974.120	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>843.974.120</b>	

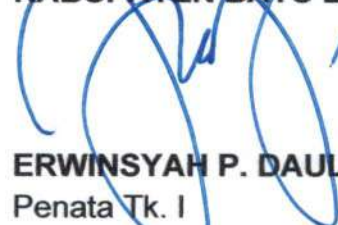
Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Pit. **KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**KABID ANGGARAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**ERWINSYAH P. DAULAY, S.S.T.Pi., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19880704 201403 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Jabatan : **KASUBBID ANGGARAN I**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., M.M.**  
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ANGGARAN**  
**BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama  
**KASUBBID ANGGARAN I**  
**BKAD KABUPATEN BATU BARA**

  
**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	39
	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	39
	Tersusunnya dokumen DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	39
	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	39
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>230.105.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	46.850.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.750.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	63.245.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76.260.000	PAPBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	PAPBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	PAPBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>230.105.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua

**KABID ANGGARAN  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama

**KASUBBID ANGGARAN I  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP 19860530 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IDARLIANI, S.Ak.**  
Jabatan : **KASUBBID ANGGARAN II**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., M.M.**  
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ANGGARAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama  
**KASUBBID ANGGARAN II BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**IDARLIANI, S. Ak**  
Penata Tk. I  
NIP 19720404 199402 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	2
	Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2
	Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	5
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1
	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>613.869.120</b>	<b>PAPBD</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.834.560	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	55.054.560	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	284.545.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	207.085.000	PAPBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20.350.000	PAPBD
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16.000.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>613.869.120</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua

**KABID ANGGARAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi., M.M.**  
Penata Tk. I  
NIP 19880704 201403 1 002

Pihak Pertama

**KASUBBID ANGGARAN II BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**IDARLIANI, S. Ak**  
Penata Tk. I  
NIP 19720404 199402 2 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Jabatan : **KABID ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Jabatan : **Plt. KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**Plt. KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810430 200903 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA BIDANG ASET  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Persen	92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.161.572.112	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.161.572.112</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Pit. **KEPALA BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**RENOLD ASMARA, A.P., S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751010 199603 1 002

Pihak Pertama  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810430 200903 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YESSI AMELIA AGUSTINA SIREGAR, S.E., M.M.**  
Jabatan : **KASUBBID PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBID PENGAMANAN DAN  
PENGHAPUSAN BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**YESSI A. AGUSTINA S, S.E., M.M.**  
Penata  
NIP. 19860807 201101 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Persentase Laporan Inventaris Aset Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>92</b>
	Tersusunnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	100
	Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1
	Tersusunnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	635.535.000	PAPBD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	280.655.000	PAPBD
	Penilaian Barang Milik Daerah	19.500.000	PAPBD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	335.380.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>635.535.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ASET BKAD**  
**KABUPATEN BATU BARA**



**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBID PENGAMANAN DAN**  
**PENGHAPUSAN BKAD**  
**KABUPATEN BATU BARA**



**YESSI A. AGUSTINA S, S.E., M.M.**  
 Penata  
 NIP. 19860807 201101 2 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YOPIE ASRIANSYAH, S.E.**  
Jabatan : **KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**YOPIE ASRIANSYAH, S.E.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19840805 201406 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV  
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>92</b>
	Terusunnya dokumen penyusunan standar harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Laporan	1
	Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1
	Terusunnya dokumen laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>267.759.112</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyusunan Standar Harga	122.630.112	PAPBD
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	6.300.000	PAPBD
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	138.829.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>267.759.112</b>	<b>PAPBD</b>

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**YOPIE ASRIANSYAH, S.E.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19840805 201406 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
SUBSTANSI PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FAUZI ANDAYU, A.Md.**  
Jabatan : **PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
/ KETUA TIM PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**

**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**

Penata Tk.I

NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KETUA TIM PEMANFAATAN  
POTENSI ASET DAERAH  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

**FAUZI ANDAYU, A.Md.**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19871116 201001 1008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KETUA TIM PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>92</b>
	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	Orang	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>258.278.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	150.450.000	PAPBD
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	107.828.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>258.278.000</b>	

Air Putih, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua  
**KABID ASET BKAD  
KABUPATEN BATU BARA**



**NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KETUA TIM PEMANFAATAN POTENSI  
ASET DAERAH  
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



**FAUZI ANDAYU, A.Md**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19871116 201001 1008